

Faktor Menurunnya Sikap Kemandirian.

Jika para pejuang Posyandu mengenang kelahirannya di tahun 1985 berjuang keras meningkatkan kemandirian dalam hal penanganan Kesehatan Masyarakat dan KIE program Keluarga Berencana. Sehingga dimana-mana orang rela mengorbankan beranda rumah ataupun halaman rumahnya untuk dipergunakan berkumpul para kader dan orang tua balita serta ibu hamil memeriksakan pertumbuhan bayi dalam kandungan dan pertumbuhan balita. Sehingga pernah mendapat sukses besar dalam pandangan dunia terutama dari UNICEF tentang penanganan masalah AKI.AKB dan Kepesertaan Akseptor Keluarga Berencana.

Dari beberapa keberhasilan tersebut mendorong Pemerintah di berbagai tingkatan dan di berbagai provinsi membuat program unggulan untuk menghidupkan Posyandu dan meningkatkan kualitas pelayanan dan cakupan program yang bisa dilakukan di Posyandu. Seperti halnya perbaikan prasarana posyandu, penambahan sarana posyandu, pelatihan kader bahkan di tahun seribu sembilan ratus delapan puluhan pernah ada pengangkatan kader menjadi PLKB ataupun jadi tenaga penyuluh kesehatan lingkungan. Termasuk pemberian pompa air ataupun pembuatan MCK.

Namun dengan keterbatasan pendanaan Pemerintah yang bersumber dari dana hibah ataupun pinjaman jangka panjang dari luar negeri. Digeser pada berbagai prioritas pembangunan yang sudah berjalan ke arah prioritas lainnya. Hal ini membuat masyarakat sok dan panik bahkan berdampak pada menurunnya semangat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Malah merasa ternabobokan dengan program-program-program instant seperti halnya KUT, RASKIN, PUAP, PKH, BLT, SANIMAS, P2KP, PNPM, NUSP. JAMKESMAS, PADAT KARYA, KUR. Menjadi bom waktu menurunnya sikap kemandirian masyarakat.

Sebelum diturunkannya program instant tersebut di atas. Jika akan dilakukan pertemuan dan musyawarah pembangunan cukup dengan mengundang melalui media surat atau kentongan. Masyarakat paham dan berkenan untuk hadir mengikuti penyuluhan atau rapat. Tapi kini setelah rapat itu menggunakan surat dan disediakan konsumsi bahkan disediakan transport. Masyarakat menjadi ketagihan dan bergeser kepada sikap materialistik. Malahan setiap akan membangun untuk kepentingan lingkungannya selalu menunggu program bantuan hibah ataupun program yang diluncurkan melalui DAK atau tugas Dekonsentrasi. Bila tidak maka sulit untuk mendata berapa partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam sebuah laporan.

Pergeseran budaya dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah akan berakibat pada sikap agresif masyarakat menuntut perhatian lebih dari pemerintah dengan berbagai program luncuran yang diikuti dengan dana yang dijatahkan dari Kelurahan untuk RW dan RT. Serta LSM yang dibentuk oleh setiap kelompok masyarakat. Bila tidak segera dibantu oleh pemerintah maka muncul reaksi untuk berkomentar di berbagai media bahkan menggunakan pengerahan massa untuk melakukan demonstrasi atau melalui surat budeg. Apakah itu semua merupakan implikasi dari salah asuh?

Yang lebih parah lagi tidak ada institusi yang paling bertanggung jawab dalam sebuah program. Semuanya mengatasnamakan tanggung jawab bersama. Maka dimana-mana muncul Team yang dibentuk dalam sebuah surat keputusan. Misalnya kalau dulu masalah Kesehatan pasti tanggung jawab Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan. Kalau ada masalah PKL cukup oleh Tibum. Kalau ada masalah Pendidikan cukup oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Pendidikan. Kalau masalah Agama Cukup oleh Departemen Agama. Kalau ada masalah kekurangan air untuk irigasi tanggung jawab Dinas PU. Kalau masalah jalan rusak pasti urusannya Binamarga. Kalau ada masalah kelebihan tonase muatan maka urusannya Departemen Perhubungan. Kalau ada masalah pluktuasi harga di pasar maka tanggung jawabnya Departemen Perdagangan. Namun kini semua melepaskan diri dari tanggungjawab utama. Semua berlindung dalam sebuah Team. Dengan dalih kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

Memang kebersamaan itu penting. Namun dalam manajemen harus *one man one function* walaupun tanggung jawab kolektif itu harus diartikan *Total Quality Management*. Jadi bukan menyerahkan tanggungjawab kepada orang lain. Melainkan semua harus bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan. Termasuk masyarakat yang dilayani harus bertanggung jawab atas partisipasi dan sikap gotong royong yang telah tumbuh subur sejak dahulu kala di jaman nenek moyang bangsa Indonesia. Anehnya jaman sudah berubah semua orang ingin melepaskan tanggung jawab. Bahkan tanggung jawab itu menjadi semakin buyar ada kalanya orang lain yang berbuat fihak lain harus bertanggung jawab. Bahkan harus memikul resiko dari perbuatan orang lain. Yang lebih aneh sulit diurai antara tanggung jawab administratif dengan tanggung jawab materil atau tanggung jawab keuangan. Bahkan kebijakan itu dijadikan ranah penuntutan hukum pidana.

Inikah sebagai komplikasi dari semakin berkembangnya ilmu. Sehingga semua menjadi benang kusut yang sulit diurai dari mana memperbaiki hidup dan kehidupan ini. Karena masyarakat menyalahkan pemerintah dan pemerintah menyebarkan sikap agresif masyarakat yang *over ekspektasi* untuk mendapat pelayan. Dilain pihak enggan berpartisipasi menyumbangkan swadaya masyarakat. Bahkan untuk membangun posyandu saja harus membeli tanah, membuatnya harus oleh pemborong bila anggarannya melebihi Rp 50.000.000 bahkan bila ada OPD yang berani melakukan pekerjaan tanpa menggunakan jasa borongan menjadi bulan-bulanan dan dijadikan obrik untuk digiring pada ranah tuduhan korupsi. Akhirnya semua menjadi serba ketakutan dan tidak percaya diri untuk bekerja optimal. Bisa bisa yang tidak bekerja dan tidak berbuat inovasi menjadi selamat. Yang banyak bekerja dan banyak melakukan inovasi dianggap melanggar hukum dan dipenjarakan.

Jadi sebenarnya apa tolok ukur dari keadilan itu? Apa dengan semakin banyaknya orang dipenjara menjadi negara terpandang di dunia dan mendapat bintang keberhasilan memberantas korupsi. Atau kesejahteraan dan keswadayaan yang dijadikan tolok ukur keadilan itu? Benarkah bila semua rakyat memasukan semua persoalannya ke pengadilan dianggap ada keadilan? Bukankah keadilan itu merupakan komitmen untuk hidup tertib bersama dan tenang, tentram untuk saling membesarkan dan saling menghormati saling memaafkan. Apakah keadilan itu diartikan untuk saling memeras, saling menunjukkan

kekuasaan dan kekuatan? Sebenarnya keadilan itu adalah "reugreug pageuh repeh rapih. Aman tentrem kerta raharja, sepiing pamrih rameing gawe sehingga semua orang mampu menunjukkan sikap kemandiriannya tanpa tekanan psikologis takut dipenjar".

Namun jangan harap bila semua orang merasa terancam, semua orang merasa waswas takut dipidana. Jangan harap muncul inovasi, jangan harap mampu berkarya optimal, jangan harap memunculkan sikap kemandirian. Yang ada pasti merasa serba salah dan hanya mengelus dada serta menarik nafas panjang memperhatikan orang yang ahli menuntut sesama manusia dengan dakwaan pidana dan ancaman penjara. Seolah olah tidak ada pengadilan Allah Yang Maha Adil.